



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Maluku ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ambon, Maret 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU



Dr. MOHAMMAD MALAWAT, ST. MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721029 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR, TABEL & GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU	2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 VISI DAN MISI	15
II.2 PERJANJIAN KINERJA.....	17
II.3 STRATEGI	18
II.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA	28
III. 2 REALISASI ANGGARAN.....	45

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN	47
IV.2 SARAN	47

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

Gambar I.1	Struktur Organisasi	10
Grafik I.1	Jumlah Asn Berdasarkan Golongan Ruang	11
Grafik I.2	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	17
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama	27
Tabel III.1	Indikator Kinerja Tahun 2022.....	28
Tabel III.2a	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1....	29
Tabel III.2b	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022 Sasaran 1.....	30
Tabel III.2c	Perbandingan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun Akhir Periode Renstra.....	30
Tabel III.3a	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2....	31
Tabel III.3b	Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022	31
Tabel III.3c	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022 Sasaran 2	32
Tabel III.3d	Perbandingan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun Akhir Periode Renstra.....	32
Tabel III.4a	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sasaran 3....	34
Tabel III.4b	Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Maluku	34
Tabel III.4c	Lintas Penyeberangan Komersil Antar Kabupaten/Kota	35
Tabel III.4d	Lintas Penyeberangan Komersil Dalam Kabupaten/Kota	35
Tabel III.4e	Lintas Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	36
Tabel III.4f	Lintas Penyeberangan Perintis Dalam Kabupaten/Kota	36
Tabel III.4g	Lintas Penyeberangan Perintis Antar Provinsi.....	37
Tabel III.4h	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022 Sasaran 3	37
Tabel III.4i	Pemeriksaan SPM Angkutan Penyeberangan.....	38
Tabel III.4j	Perijinan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan	39
Tabel III.4c	Perbandingan Realisasi Sasaran 3 Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun Akhir Periode Renstra.....	39
Tabel III.5a	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sasaran 4....	41
Tabel III.5b	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022 Sasaran 4	41

Tabel III.5c	Perbandingan Realisasi Sasaran 4 Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun Akhir Periode Renstra.....	44
Tabel III.7	Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode RPJMD 2021-2022.....	45
Tabel III.9	Realisasi Anggaran.....	50



1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam *good governance* itu sendiri mengandung tiga prinsip utama yaitu : akuntabilitas (pertanggungjawaban), transparansi (keterbukaan), dan partisipasi masyarakat sehingga ketiga prinsip tersebut juga harus terpenuhi dalam pembuatan pertanggungjawaban pemerintahan. Disamping itu, diharapkan sistem perencanaan kinerja yang telah ada mendapatkan saran (*feedback*) dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas administrasi dan dukungan manajemen pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Kedudukan :

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan program di bidang perhubungan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan berdasarkan Peraturan Perundang –Undangan;
4. Pembinaan teknis di bidang perhubungan
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan ketatausahaan;
8. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi :

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas.
4. Bidang Penyeberangan, terdiri :
 - a. Seksi Sarana Angkutan Penyeberangan;
 - b. Seksi Prasarana Angkutan Penyeberangan.
5. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Lalu Lintas Laut;
 - b. Seksi Manajemen Kepelabuhanan.
6. Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Antar Moda;
 - b. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi.
7. Kelompok Pejabat Fungsional.

Adapun Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bagian Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana operasional menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan asset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di

bidang kesekretariatan.

Uraian Tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan;
- g. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perhubungan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;

- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Angkutan dan Manajemen Lalu Lintas.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas angkutan jalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan;
- f. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perijinan usaha di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan;

- g. Melaksanakan bimbingan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kebijakan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Penyeberangan, yang terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Angkutan Penyeberangan;
- b. Seksi Prasarana Angkutan Penyeberangan.

Bidang Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana angkutan penyeberangan dan prasarana angkutan penyeberangan.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Penyeberangan berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas di lingkup Bidang Penyeberangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk di lingkup Bidang Penyeberangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Penyeberangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkup Bidang Penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat disusun secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di lingkup Bidang Penyeberangan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Merumuskan penyediaan data potensi bidang penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Penyeberangan dengan cara membandingkan antara rencana program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyeberangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu – waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;
5. Bidang Laut, yang terdiri dari :
- a. Seksi Manajemen dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b. Seksi Manajemen Kepelabuhanan.

Bidang Laut mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang laut sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

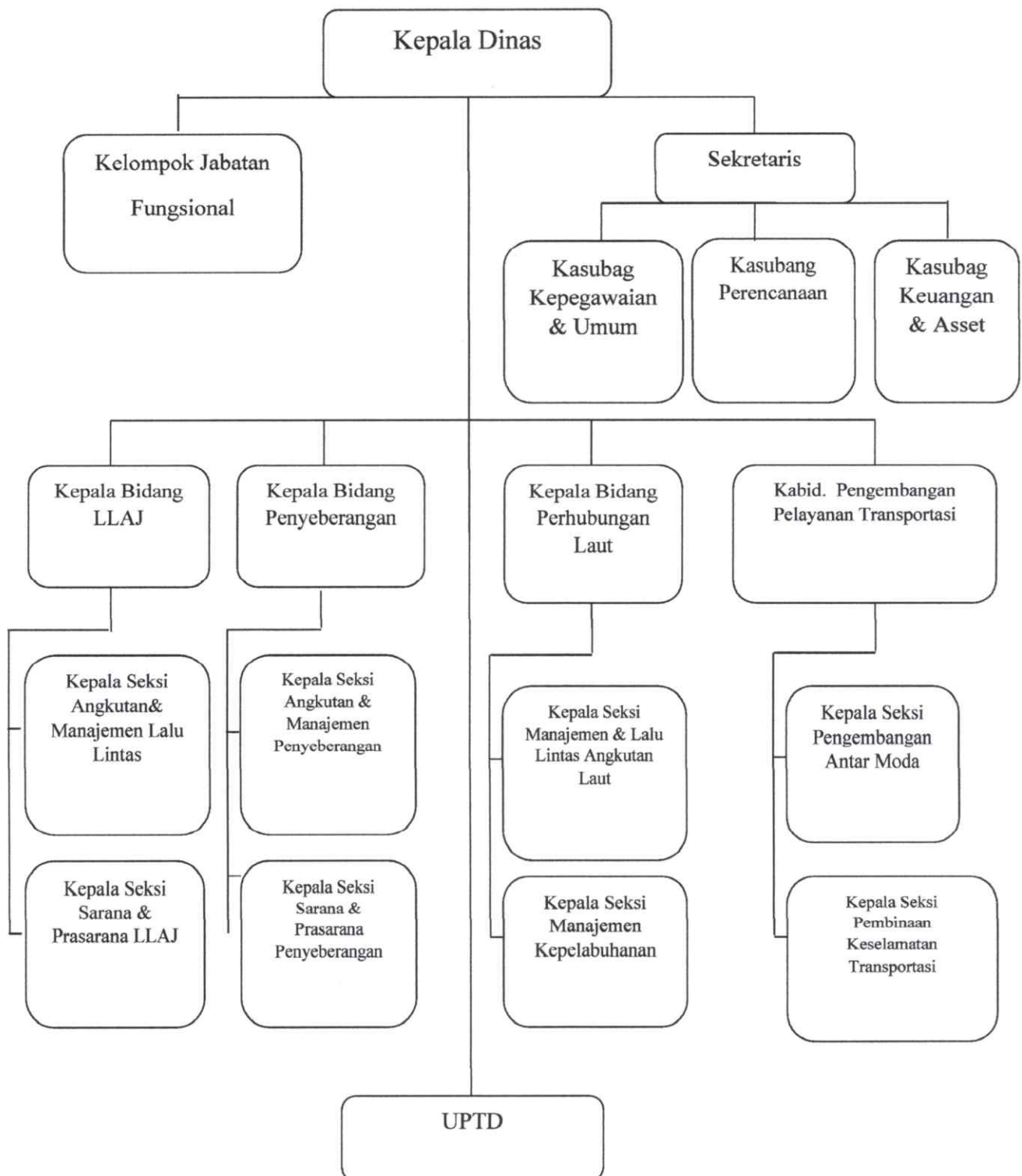
Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Laut berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas di lingkup Bidang Laut sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk di lingkup Bidang Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Laut secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan penyusunan kebijakan di lingkup Bidang Laut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang laut;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang laut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas di bidang laut;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Menyusun laporan klasifikasi, rekomendasi, perijinan usaha, dan pentarifan di Bidang Laut, sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Laut sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. Merumuskan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi, yang terdiri dari :
- a. Menyusun rencana operasional Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas di lingkup Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk di lingkup Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi di bidang pengembangan pelayanan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. Menyusun data potensi di bidang pengembangan pelayanan transportasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan keselamatan dan pengembangan fasilitas di Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang pengembangan pelayanan transportasi;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu – waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

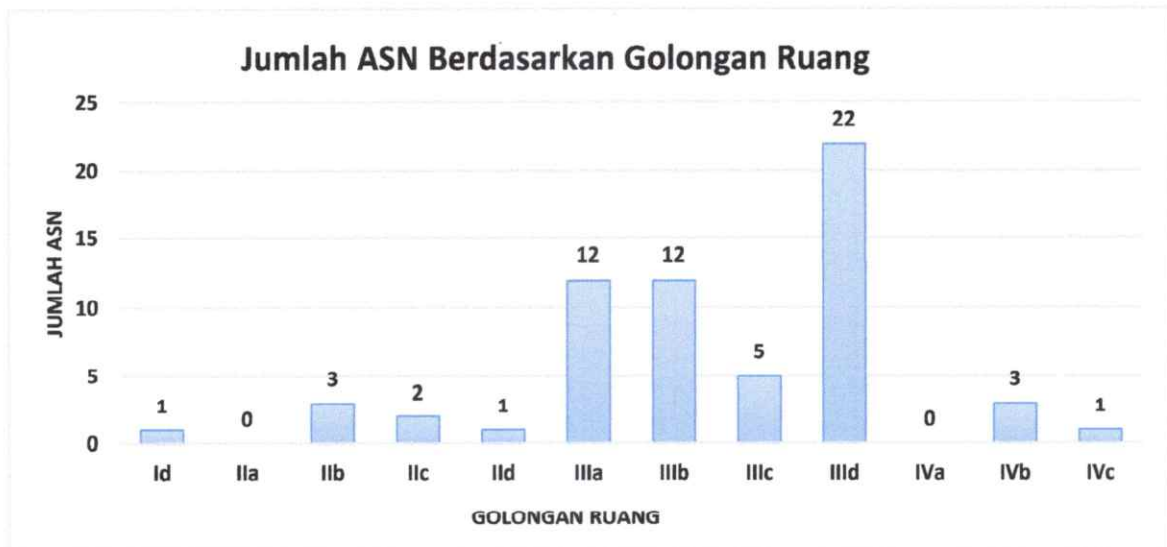
7. Kelompok Pejabat Fungsional

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku



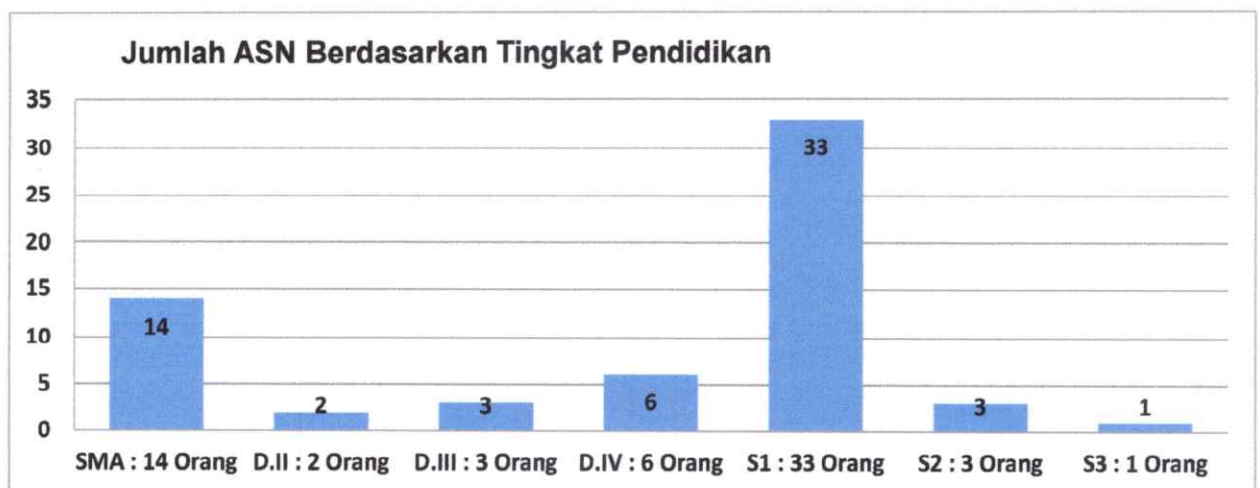
Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebanyak 62 orang. Dari struktur organisasi, Pejabat pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2022 terdiri dari 1 orang Pejabat Esselon II, 5 orang Pejabat Esselon III dan 10 orang Pejabat Esselon IV.

Jumlah pegawai menurut golongan ruang tergambar pada grafik berikut :



Grafik I.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Sedangkan jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan tergambar pada grafik berikut :



Grafik I.2 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Isu Strategis Organisasi

Beberapa isu strategis yang melatar belakangi program / kegiatan sektor Perhubungan adalah :

- a. Perhubungan merupakan sektor pendukung pelayanan dasar dimana sarana dan prasarana perhubungan masih sangat minim.
- b. Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dan 92,4% merupakan wilayah lautan, kabupaten / kota tersebar di pulau – pulau sehingga infrastruktur perhubungan mendapat peranan yang sangat penting untuk mendukung program pemerintah daerah maupun pusat antara lain:
 - Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - Percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - Prioritas pembangunan pulau – pulau terluar / terdepan;
 - Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
- c. Salah satu pilar untuk mewujudkan visi Pemerintahan Presiden Republik Indonesia adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim.

Permasalahan Utama Organisasi

- Perlunya dukungan SDM Perhubungan yang berkualifikasi tertentu di provinsi maupun di kabupaten / kota terutama untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan perhubungan. Terbatasnya dukungan pemerintah daerah bagi aparatur dinas untuk meningkatkan kapasitas melalui pendidikan lanjutan dengan spesifikasi bidang transportasi;
- Kabupaten/kota yang tersebar di Kepulauan Maluku sehingga koordinasi dan pengawasan pelayanan serta perencanaan transportasi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit;
- Proses Tahapan perencanaan yang cukup lama untuk pembangunan suatu prasarana transportasi dan tantangan dari sebagian besar masyarakat dalam penyediaan lahan pembangunan menjadi permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pembangunan prasarana transportasi.

Landasan Hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah(SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
- Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku selama Tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, struktur organisasi, serta landasan hukum;

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022, terdiri dari :

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran.

Bab IV – Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja .

Lampiran – Lampiran.

PERENCANAAN KINERJA

Tata kerja organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku. Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah ***“Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.”***

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mempunyai Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku perpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2019 – 2024;
2. Review Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 2019 –2024;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022 beserta perubahannya;
4. Dokumen perencanaan wilayah yaitu Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Maluku, Tataran Transportasi Lokal (Tatralok), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan teknislainnya.

A. VISI DAN MISI

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah / organisasi pada masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 23 Tahun 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perhubungan. Dalam kedudukannya itu, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku harus dapat memainkan peran sebagai OPD yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Maluku untuk mengembangkan semua sektor tidak terlepas dari tantangan dan ancaman – peluang dan kekuatan serta isu strategis yang dimiliki, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yaitu ***“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka ada 6 (enam) misi yang ditetapkan, antara lain:

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
4. **Peningkatan Infrastruktur dan Konektisitas Gugus Pulau;**
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata;
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Dari uraian visi dan misi diatas dan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku maka dapat dirumuskan Tujuan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Meningkatkan system transportasi yang handal dan terkoneksi.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas penunjang transportasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, selamat, tertip, lancar, terjangkau dan tepat waktu serta ramah lingkungan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur menuju birokrasi yang bersih,

berwibawa, kompeten dan melayani disertai peningkatan dan pemerataan sarana penunjang.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2022 dan ditandatangani oleh bapak Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Maluku menggambarkan sasaran strategis OPD pada tahun 2022 dengan target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan DPA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2022.

Terjadi perubahan anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku (Rasionalisasi) sehingga dilakukan perubahan anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran atau DPPA – OPD Tahun Anggaran 2022. Gambaran tentang uraian sasaran dan target kinerja pada tabel berikut :

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Sasaran1 : Peningkatan PelayananTransportasi Udara dan AntarModa	
Indikator Kinerja	Target
Tingkat Keselamatan Transportasi	100 %
Sasaran 2 : Peningkatan PelayananTransportasi Darat (LLAJ)	
Indikator Kinerja	Target
Penurunan angka Kecelakaan Transportasi Jalan	9 %
Sasaran 3 :PeningkatanPelayananTransportasiPenyeberangan	
Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang terbangun	51,52 %
2. Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	3,03 %
Sasaran 4 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	
Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Pelabuhan yang Terbangun	52,57 %
2. Persentase Pulau Berpenduduk yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	18,2 %

C. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Perumusan strategi pengembangan rencana jangka menengah yang efektif hendaknya mampu mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang ada serta kekuatan dan kelemahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dimana kekuatan-kelemahan secara internal serta peluang-ancaman secara eksternal pada masing-masing Gugus Pulau sebagai suatu proses perencanaan strategis dan kebijakan yang dituangkan dalam Renstra SKPD merupakan pedoman pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah maupun pusat.

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan:

1. Strategi dan Penataan Penyelenggaraan Perhubungan

Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Gugus Pulau sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global, penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan di bidang perhubungan (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan melibatkan peran serta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (*owner*) menjadi regulator dan fasilitator.

2. Strategi Pembangunan Perhubungan

Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh Gugus Pulau Provinsi Maluku. Strategi pembangunan masing-masing matra transportasi adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

- 1) Strategi Penataan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Strategi ini diarahkan untuk melakukan penataan dan peningkatan penyelenggaraan perhubungan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Penataan dan peningkatan penyelenggaraan perhubungan darat sebagai bagian integral dari pembangunan perhubungan secara global dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan darat dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peranserta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (*owner*) menjadi regulator dan fasilitator;
- 2) Strategi Pembangunan Perhubungan Darat : Strategi Pembangunan perhubungan darat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan darat kepada masyarakat baik di seluruh Gugus Pulau.

b. Angkutan Jalan

Kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan jalan baru dalam jangka panjang akan dikendalikan dengan strategi optimalisasi pemanfaatan fasilitas jalan yang telah ada sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan melalui pendayagunaan fasilitas jembatan timbang

sebagai sarana pengawasan dan penegakan hukum, penyediaan fasilitas keselamatan jalan serta penyediaan subsidi keperintisan dan sarana keperintisan. Strategi penanganan keselamatan LLAJ yang dilakukan meliputi : *Safer Management; Safer System; Safer People; Safer Vehicle dan Safer Road*. Pendekatan yang akan dilakukan dengan *5E (Engineering, Education; Enforcement; Encoragment;Emergency)*.

c. Transportasi Perkotaan

Kondisi perkotaan yang semakin berkembang menuntut ketersediaan ruang yang memadai dan permintaan jasa transportasi yang semakin besar, sehingga diperlukan strategi pengembangan angkutan perkotaan yang mempertimbangkan besarnya skala pelayanan secara berkesinambungan melalui pengembangan angkutan perkotaan, angkutan massal, penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, hemat BBM, meningkatkan rekayasa dan manajemen lalu lintas, menciptakan keterpaduan antar moda di kawasan perkotaan serta tersedianya fasilitas keselamatan yang memadai, perlu didahului dengan pengembangan sistem transportasi perkotaan yang menerus yang tidak mengenal batas administrasi wilayah terutama pada kota – kota aglomerasi dimana kebutuhan bagi para komuter cukup tinggi. Strategi lainnya guna mendukung pengembangan transportasi perkotaan adalah masih perlunya intervensi pemerintah terutama dalam membatasi pertumbuhan kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi.

d. Angkutan Penyeberangan

Pengembangan Angkutan Penyeberangan dalam jangka panjang akan diselaraskan dengan pengembangan angkutan jalan. Keberadaan angkutan penyeberangan di suatu tempat akan berakhir bila telah tersedia fasilitas jembatan. Oleh karena itu pengembangan angkutan penyeberangan dalam jangka panjang akan disesuaikan dengan pengembangan jalan dan jembatan melalui strategi substitusi dan strategi komplementer. Strategi substitusi dilakukan apabila kegiatan angkutan penyeberangan tidak diperlukan lagi, sehingga perlu dilakukan relokasi ke tempat lain yang lebih memerlukan, sedangkan strategi

komplementer adalah bila angkutan penyeberangan mampu bersinergi dengan angkutan jalan, sehingga angkutan penyeberangan diposisikan sebagai *derived demand* angkutan jalan dan pengembangannya lebih difokuskan kepada optimalisasi dan kompatibilitas elemen – elemen dalam sistem angkutan penyeberangan antar Gugus Pulau dalam tataran TransMaluku.

e. Angkutan Laut

Dalam rangka meningkatkan *share* muatan pelayaran dan pengembangan angkutan antar Gugus Pulau dilakukan melalui beberapa strategi:

- Membangun prasarana yang berdampak langsung bagimasyarakat;
- Menyiapkan fasilitas infrastruktur transportasi antarmoda;
- Penciptaan Iklim Usaha dan investasi yang kondusif antara lain dilakukan melalui regulasi terkait dengan pemberian kemudahan perbankan dan fasilitas perpajakan serta penetapan *term of trade* yang berpihak kepada industri pelayaran lokal maupun nasional, sehingga dapat meningkatkan kinerja industri pelayaran di ProvinsiMaluku;
- Pendanaan dibutuhkan bagi pengembangan angkutan laut lokal maupun nasional diharapkan dapat diperoleh baik dari lembaga keuangan bank maupun non – bank , disamping kemampuan industri pelayaran untuk berkembang dengan hasil aktivitas usahanyasendiri;
- Kepastian dan ketersediaan muatan, ketersediaan muatan antara lain direalisasikan dalam bentuk komitmen pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan produksi potensi unggulan wilayah sebagai komoditas ekspor wilayah di tiap GugusPulau;
- Khusus untuk kegiatan angkutan laut perintis, strategi yang hendak diterapkan adalah strategi pendanaan dan strategi kepastian muatan. Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk membuka daerah terisolasi dan daerah non –komersial.

Beberapa strategi untuk pengembangan pelayaran rakyat, adalah sebagai berikut :

- Perbaikan Sistem Manajemen, dilakukan melalui perbaikan manajemen operasional yang efisien, peningkatan keahlian manajerial dan peningkatan kualitas;
- Peningkatan teknologi perkapalan, dilakukan dengan penggunaan kapal kayu, utilitas kapal modern;
- Industri pelayaran tradisional, dilakukan melalui institusi pendanaan dan pembangunan infrastruktur;
- Reposisi area pelayaran, dilakukan dengan *rerouting* dan *connecting* dengan pelayaran antar pulau serta identifikasi daerah-daerah pelayanan baru di setiap gugus pulau.

Berdasarkan strategi pengembangan angkutan laut secara parsial, maka strategi peningkatan kapasitas armada angkutan laut di Provinsi Maluku, adalah :

- Merancang jenis kapal yang tepat untuk daerah operasi wilayah kepulauan Maluku;
- Penambahan kapal – kapal perintis dengan ukuran 1200 – 2000 DWT;
- Mengoptimalkan lembaga pendanaan baik bank maupun non – bank;
- Memberikan insentif yang wajar dalam iklim usaha angkutan laut di Maluku;
- Menyederhanakan pemberian fasilitas pajak bagi usaha di bidang angkutan laut di Maluku;
- Mendorong pengembangan industri galangan secara bertahap dengan jaminan kepastian muatan;
- Mendorong terwujudnya kepastian pelayanan perintis secara efektif dan efisien;
- Menyediakan kapal perintis sebagai embrio pengembangan armada niaga nasional;
- Meninggalkan rute perintis yang mulai bersifat komersial;
- Menyusun *rerouting* tahunan sejalan dengan keberhasilan penyelenggaraan angkutan laut perintis;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan angkutan laut perintis secara periodik;
- Mengurangi subsidi pemerintah secara bertahap dengan cara memperkuat daya saing operator angkutan laut perintis;
- Mendorong pelayaran rakyat memanfaatkan teknologi dan manajemen untuk penyelenggaraan pelayaran efisien dan efektif di wilayah Kepulauan Maluku.

f. Kepelabuhanan

Strategi pengembangan dan peningkatan pelayanan pelabuhan laut adalah:

- Membangun / mengembangkan pelabuhan – palabuhan dengan *waiting time* tinggi; (target : *road to zero waitingtime*);
- Membangun pelabuhan – pelabuhan pengumpan / lokal bagi daerah – daerah yang membutuhkan serta pelabuhan singgah TollLaut;
- Mempersiapkan *hub internasional port* secara bertahap agar pelabuhan-pelabuhan di Maluku mampu mengangkut muatan dari dan ke Maluku melalui beberapa pintu keluar baik pintu Utara maupun pintu Selatan Kepulauan Maluku;
- Mengkaji ulang dan mengembangkan indikator kinerja operasional pelabuhan dengan menyusun pedoman kinerja operasional untuk diterapkan pada masing – masing pelabuhan;
- Merencanakan secara berkala kebutuhan pengembangan kapasitas pelabuhan yang tercantum dalam Rencana Induk setiap pelabuhan;
- Merancang secara berkala prioritas pengembangan fasilitas, perangkat lunak maupun SDM kepelabuhanan sesuai Rencana Induk;
- Melakukan monitoring secara berkala terhadap hasil pelayanan Jasa kepelabuhanan melalui otomatisasi sistem pelaporan;
- Menyusun pedoman teknis pembangunan dan pengembangan pelabuhan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas, pemeliharaan fasilitas, monitoring kegiatan pembangunan, pengerukan dan reklamasi, pengaturan lalu – lintas kapal serta penyelenggaraan pelabuhan khusus;
- Meningkatkan manajemen lalu – lintas kapal di pelabuhan dengan teknologi informasi yang bersifat *realtime*;
- Mengkaji kembali secara berkesinambungan pola tatanan kepelabuhanan nasional sejalan dengan perkembangan dan perubahan kinerja sektor produksi.

g. Keselamatan Pelayaran

Strategi pengembangan dan peningkatan keselamatan pelayaran adalah :

- Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran;
- Peningkatan Kompetensi SDM;
- Reformasi regulasi bidang keselamatan pelayaran;
- Menumbuhkan peran serta masyarakat melalui sosialisasi keselamatan pelayaran;

h. Transportasi Udara

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor transportasi udara dalam jangka menengah (2019 – 2024), maka dilakukan 2 (dua) strategi pokok pembangunan transportasi udara, yaitu :

- Strategi Penataan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Strategi ini diarahkan untuk melakukan penataan Sistem Penerbangan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik skalalokal, regional maupun nasional. Penataan tersebut dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan udara sejalan dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan serta peraturan perundang – undangan di bidang perhubungan udara (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Perhubungan Udara, serta peningkatan peran swasta dalam pengelolaan transportasi udara, serta mereposisi peran pemerintah menjadi regulator danfasilitator;
- Strategi Pembangunan Perhubungan Udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan udara bagi masyarakat, baik di Gugus Pulau maupun antar kabupaten / kota dan antar provinsi. Strategi pembangunan perhubungan udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan udara kepadamasyarakat;
- Pembukaan jalur-jalur penerbangan baru dan pembangunan bandara udara yang dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam

rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variable – variable ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;

- Pembangunan perhubungan udara difokuskan pada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.

i. Bandara Udara

Pengembangan Bandar Udara dalam jangka panjang akan mengikuti strategi optimalisasi, pendanaan, antisipasi keadaan darurat, keterbukaan, sinergi operasi, sertifikasi, *eco – airport*, dan otomatisasi Bandar Udara. Strategi optimalisasi dan antisipasi keadaan darurat dilakukan pada Bandar Udara dilokasi bencana dan Bandar Udara kawasan perbatasan; strategi pendanaan dengan pola pendanaan campuran dilakukan dengan mengedepankan peran swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan Bandar Udara baru yang didasarkan pada kelayakan investasi sesuai dengan mekanisme pasar; strategi keterbukaan terkait dengan kerjasama penyelenggaraan Bandar Udara dan pengelolaan fasilitas; strategi sinergi operasi difokuskan pada penggunaan Bandar Udara secara bersama sipil dan militer pada sisi yang berbeda; strategi sertifikasi terkait dengan pemenuhan dokumen pengoperasian Bandar Udara (Rencana Induk, KKOP dan Batas Kawasan Kebisingan); Strategi *eco – airport* terkait dengan kewajiban menyusun dokumen AMDAL; strategi otomatisasi dilakukan dengan penerapan otomatisasi Bandar Udara sesuai dengan perkembangan teknologi mutakhir.

j. Navigasi Penerbangan

Pengembangan navigasi penerbangan dalam jangka panjang khususnya pelaksanaan manajemen lalu lintas udara dilakukan dengan strategi harmonisasi *Air Navigation Service Provider (ANSP)*, strategi

pengembangan *Air Traffic Flow* dan strategi *management* sesuai dengan strategi regional (Asia – Pasifik).

Disamping itu akan diterapkan strategi implementasi *ATN Airground* untuk komunikasi penerbangan, strategi restrukturisasi rute penerbangan berbasis *GNSS* dan strategi integrasi *NASC*.

k. Keamanan Penerbangan

Dibidang keamanan penerbangan dalam jangka panjang akan mengikuti strategi ofensif, yaitu :*audit security*, pemeriksaan barang kiriman dengan anjing pelacak, dan penggunaan *Sky Marshall* sebagai sistem pengamanan didalam pesawat udara.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah suatu indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Penetapan IKU telah mengacu pada RenstraDinas Perhubungan Provinsi Maluku serta RPJMD tahun 2019 – 2024. IndikatorKinerjaUtama Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.2

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan/ Formulasi Hitungan
	Tujuan	Sasaran		
1	Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau dengan peningkatan sarana prasarana transportasi	Peningkatan pelayanan transportasi udara dan Antar Moda	- Tingkat Keselamatan Transportasi	Tingkat Keselamatan = (jumlah arus transportasi – jumlah kecelakaan) / jumlah arus transportasi x 100%
		Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	- Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan	(angka kecelakaan tahun n – angka kecelakaan tahun n-1 / angka kecelakaan tahun n-1) x 100%
		Peningkatan Pelayanan Transportasi Penyeberangan	- Persentase Pelabuhan yang Terbangun	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun / kebutuhan pelabuhan penyeberangan di Maluku x 100%
			- Pertumbuhan trayek Angkutan Penyeberangan	Persentase penambahan jumlah trayek/lintasan/jaringan transportasi penyeberangan.
		Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	- Persentase Pelabuhan Laut yang Terbangun	Jumlah pelabuhan laut yang sudah terbangun / jumlah pelabuhan yang ditetapkan di Maluku berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) x 100%.
			- Persentase pulau berpenghuni yang terlayani angkutan laut perintis	Jumlah pulau yang terlayani perintis / jumlah pulau berpenghuni x 100%.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Hasil proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2022 dan ditandatangani oleh Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menggambarkan sasaran strategis SKPD pada tahun 2022 dengan target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan DPA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2022.

III. 1 Capaian Kinerja

Tabel III.1 Tabel Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Sasaran 1 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara dan Antar Moda	
Indikator Kinerja	Target
Tingkat Keselamatan Transportasi	100 %
Sasaran 2 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat (LLAJ)	
Indikator Kinerja	Target
Penurunan Angkat Kecelakaan Transportasi Jalan	9 %
Sasaran 3 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Penyeberangan	
Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	51,52 %
2. Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	3,03 %

Sasaran 4 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	
Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Pelabuhan yang Terbangun	52,57 %
2. Persentase Pulau Berpenduduk yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	18,2 %

Pengukuran capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2021. Melalui evaluasi dan review sistem pelaporan maka untuk mempertegas tugas pokok dinas tanpa mengubah perencanaan anggaran dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama, Sasaran Kinerja Dinas dan Indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. penyajian pengukuran capaian kinerja menyesuaikan perubahan dimaksud.

Sasaran 1 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara dan Antar Moda
Tabel III.2a Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1) Tingkat Keselamatan Transportasi	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan Sasaran 1, berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi menjadi urusan Program Pengembangan Pelayanan Antar Moda Transportasi, yang khususnya terkait transportasi udara di Provinsi Maluku. Selama periode renstra 2019-2024 adapun kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan monitoring evaluasi pelayanan angkutan udara pada kabupaten/kota, dilakukan koordinasi dan pemantauan fasilitas keselamatan di Bandar Udara. Dari hasil kegiatan tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak adanya kejadian kecelakaan pesawat.

Tabel III.2b Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2020 - 2022

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tingkat Keselamatan Transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III.2c Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 s/d 2022 dengan
Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1 Tingkat Keselamatan Transportasi	100%	100%	100%	100%

Faktor keberhasilan dalam mewujudkan Sasaran I adalah :

1. Adanya program/kegiatan yang dapat meningkatkan keselamatan transportasi;
2. Pelaksanaan Identifikasi Fasilitas Keselamatan Transportasi dimana dilakukan koordinasi dan pemantauan di Bandar Udara di Kabupaten/Kota terkait fasilitas keselamatan di Bandar Udara.

Faktor kegagalan dalam mewujudkan Sasaran I adalah :

1. Kurangnya koodinasi antar Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait fasilitas keselamatan yang ada didalam pesawat atau di dalam bandara;
2. Kurang pengawasan terhadap fasilitas keselamatan yang ada pada pesawat dan bandara.

Upaya yang diperlukan dalam mewujudkan Sasaran 1 adalah :

1. Meningkatkan koordinasi lingkup perhubungan di pusat dan daerah sehingga kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi dapat dilaksanakan. Selain itu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menganggarkan pengadaan fasilitas keselamatan transportasi.

Sasaran 2 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat

Tabel III.3a Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1) Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan	9%	-34,11%	5,79

Sumber : DIRLANTAS POLDA MALUKU

Didalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) terdapat 5 Pilar Keselamatan Jalan, kelima pilar keselamatan tersebut menjadi penetapan target pencapaian dari keselamatan jalan dan melaksanakan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan transportasi adalah faktor manusia sebagai pengguna jalan.

Tabel III.3b Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Laka	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Total
1	Kota Ambon	93	49	56	73	178
2	Maluku Tengah	34	17	24	24	65
3	Kota Tual	25	3	9	19	31
4	Pulau Buru	50	13	4	80	97
5	Kepulauan Tanimbar	66	12	38	45	95
6	Seram Bagian Timur	28	12	22	23	57
7	Seram Bagian Barat	49	17	9	69	95
8	Pulau Aru	31	4	21	28	53
9	Maluku Barat Daya	21	6	10	28	44
10	Buru Selatan	1	2	0	0	2
11	Maluku Tenggara	3	1	0	4	5
Total		401	136	193	393	722

Sumber : DIRLANTAS POLDA MALUKU

Untuk Sasaran II, Berdasarkan Laporan yang di terima dari Dirlantas Polda Maluku terkait data jumlah kecelakaan lalu lintas, diketahui bahwa Tingkat Kecelakaan di tahun 2021 sebanyak 229 kejadian naik menjadi 401 kejadian kecalakaan di tahun 2022. Dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut :

Tabel III.3c Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2020 - 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Penurunan Angka Kecelakaan	-12,30	16,01	-34,11	136	178	5,79

Dinas perhubungan telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menunjang penurunan angka kecelakaan dengan adanya kegiatan penegakan disiplin operasional AKDP dan Monitoring Evaluasi.

Kinerja yang dicapai sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian sasaran di atas melalui Penegakan Disiplin dan Pengawasan Rutin Disiplin. Dalam Tahun 2022 kegiatan Penegakan disiplin dan pengawasan rutin AKDP yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon. Dari kegiatan Penegakan Disiplin dan Pengawasan Rutin Disiplin yang diperiksa sebanyak 503 Unit (12 kali pengawasan).

Tabel III.3d Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 s/d 2022 dengan
Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
Penurunan Angka Kecelakaan	-12,30%	16,01%	-34,11	9%

Faktor keberhasilan dalam mewujudkan sasaran 2 adalah :

1. Adanya sinergitas antar stakeholder yang memiliki kewenangan dalam menurunkan angka kecelakaan;

2. Perlu adanya peningkatan pengaturan lalu lintas, melengkapi fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas keselamatan pada kendaraan serta kesadaran pengguna jalan akan pentingnya keselamatan di jalan.

Faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam mewujudkan sasaran 2, yaitu :

1. Minimnya SDM Dinas Perhubungan dalam melakukan penilaian kebutuhan fasilitas keselamatan di jalan, sehingga sering tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan;
2. Fungsi koordinasi yang belum maksimal secara menyeluruh untuk melihat kebutuhan fasilitas keselamatan jalan

Upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang Sasaran 2

1. Membuat kebijakan yang ketat terhadap penyedia jasa transportasi sehingga penyedia menerapkan alat keselamatan pada angkutannya secara baik dan sesuai standar SNI yang mana berakibat sanksi pencabutan izin pengoperasian angkutan;
2. Peningkatan SDM dibidang teknis perhubungan darat yang dapat menginventarisir kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yang belum tersedia pada ruas jalan Provinsi dan Peningkatan SDM dibidang teknis perencanaan dan pengadaan fasilitas keselamatan jalan
3. Meningkatkan koordinasi lingkup perhubungan di pusat dan daerah sehingga kegiatan perencanaan dan pengadaan fasilitas keselamatan jalan dapat terpenuhi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk mendapat informasi sejauh mana penggunaan sumber daya manusia dalam mendukung tercapainya indikator kinerja. Dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Sasaran II (dua), dilaksanakan oleh 224 orang dalam kegiatan Penegakan Disiplin dan Pengawasan Rutin Disiplin.

Sasaran 3 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Penyeberangan

Tabel III.4a Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1) Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	51,52%	91,89%	178%
2) Pertumbuhan trayek angkutan penyeberangan	3,03%	- 12,68%	6,18%

Sasaran jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun untuk dana APBD tidak dapat dilakukan, disebabkan pembiayaan pembangunan yang sangat besar. Sementara itu, salah satu usaha mewujudkan konsep Trans Maluku. Sampai dengan Tahun 2022 telah tersedia 35 Pelabuhan Penyeberangan yang didalamnya 5 Pelabuhan Penyeberangan dalam Tahap Konstruksi, sebanyak 3 pelabuhan penyeberangan masih dalam tahap pembangunan dengan dana APBN.

Tabel III.4b Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Maluku

No	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi
1	Pelabuhan Penyeberangan Galala	Kota Ambon
2	Pelabuhan Penyeberangan Poka	Kota Ambon
3	Pelabuhan Penyeberangan Hunimua (Liang)	Kabupaten Maluku Tengah
4	Pelabuhan Penyeberangan Wairiang (Kailolo)	Kabupaten Maluku Tengah
5	Pelabuhan Penyeberangan Umeputih (Kulur)	Kabupaten Maluku Tengah
6	Pelabuhan Penyeberangan Wahai	Kabupaten Maluku Tengah
7	Pelabuhan Penyeberangan Nalahia (Nusaluat)	Kabupaten Maluku Tengah
8	Pelabuhan Penyeberangan Jazirah Salahutu (Waa)	Kabupaten Maluku Tengah
9	Pelabuhan Penyeberangan Amahai Ina Marina	Kabupaten Maluku Tengah
10	Pelabuhan Penyeberangan Namlea	Kabupaten Buru
11	Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bara	Kabupaten Buru
12	Pelabuhan Penyeberangan Waipirit	Kabupaten Seram Bagian Barat
13	Pelabuhan Penyeberangan Waisala	Kabupaten Seram Bagian Barat
14	Pelabuhan Penyeberangan Wailey	Kabupaten Seram Bagian Barat
15	Pelabuhan Penyeberangan Air Nanang	Kabupaten Seram Bagian Timur
16	Pelabuhan Penyeberangan Geser	Kabupaten Seram Bagian Timur
17	Pelabuhan Penyeberangan Gorom	Kabupaten Seram Bagian Timur
18	Pelabuhan Penyeberangan Kesui	Kabupaten Seram Bagian Timur
19	Pelabuhan Penyeberangan Teor	Kabupaten Seram Bagian Timur
20	Pelabuhan Penyeberangan Ilwaki	Kabupaten Maluku Barat Daya
21	Pelabuhan Penyeberangan Lakor	Kabupaten Maluku Barat Daya

22	Pelabuhan Penyeberangan Kisar	Kabupaten Maluku Barat Daya
23	Pelabuhan Penyeberangan Letwurung (Tepa)	Kabupaten Maluku Barat Daya
24	Pelabuhan Penyeberangan Moa	Kabupaten Maluku Barat Daya
25	Pelabuhan Penyeberangan Leti	Kabupaten Maluku Barat Daya
26	Pelabuhan Penyeberangan Tual	Kota Tual
27	Pelabuhan Penyeberangan Toyando	Kota Tual
28	Pelabuhan Penyeberangan Elat	Kabupaten Maluku Tenggara
29	Pelabuhan Penyeberangan Dobo	Kabupaten Kepulauan Aru
30	Pelabuhan Penyeberangan Benjina	Kabupaten Kepulauan Aru
31	Pelabuhan Penyeberangan Lamerang	Kabupaten Kepulauan Aru
32	Pelabuhan Penyeberangan Taberfane	Kabupaten Kepulauan Aru
33	Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
34	Pelabuhan Penyeberangan Larat	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
35	Pelabuhan Penyeberangan Wunlah	Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Pada Tahun 2022 di Maluku terdapat 62 lintasan penyeberangan yang terdiri dari 4 lintasan Komersil dalam Kab/Kota, 8 lintasan komersil antar kab/kota, 36 lintasan perintis dalam kab/kota, 15 lintasan perintis antar kab/kota, dan 5 lintasan perintis antar provinsi. Lintas penyeberangan dilayari oleh 30 kapal penyeberangan dengan 3 unit kapal mangkarak/rusak, dan 1 unit kapal docking.

Tabel III.4c Lintas Penyeberangan Komersil Antar Kabupaten/Kota

No	Nama Lintas	Kabupaten/Kota	Nama Kapal
1	Hunimua - Waipirit	Maluku Tengah - Seram Bagian Barat	KMP. Roka Tenda KMP. Inelika KMP. Terubuk KMP. Sardinela KMP. Tanjung Kuako
2	Galala - Namlea	Ambon - Buru	KMP. Temi KMP. Wayangan KMP. Garda Maritim 5

Tabel III.4d Lintas Penyeberangan Komersil Dalam Kabupaten/Kota

No	Nama Lintas	Kabupaten/Kota	Nama Kapal
1	Waai - Umeputih	Maluku Tengah	KMP. Samandar KMP. Layur
2	Waai - Inamarina	Maluku Tengah	KMP. Cantika Lestari 99 KMP. Tatihi

Tabel III.4e Lintas Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota

No	Nama Lintas	Kabupaten/Kota	Nama Kapal
1	Namlea – Manipa	Buru – Seram Bagian barat	KMP. Tanjung Sole
2	Waesala – Ambon	Seram Bagian Barat – Ambon	KMP. Tanjung Sole
3	Ambon – Banda	Ambon – Maluku Tengah	KMP. Bahtera Nusantara 02
4	Banda – Tual	Maluku Tengah – Tual	KMP. Bahtera Nusantara 02
5	Umeputih – Wailey	Maluku Tengah – Seram Bagian Barat	KMP. Layur
6	Galala – Ambalau	Ambon – Buru Selatan	KMP. Tanjung Kabat
7	Ambon – Air Nanang	Ambon – Seram Bagian Timur	KMP. Lorry Amar
8	Teor – Tual	Seram Bagian Timur – Tual	KMP. Lorry Amar
9	Kur – Kesui	Tual – Seram Bagian Timur	KMP. Tanjung Madlahar
10	Tual – Bandaeli	Tual – Maluku Tenggara	KMP. Tanjung Madlahar
11	Tual – Dobo	Tual – Kepulauan Aru	KMP. Lobster
12	Tual – Elat	Tual – Maluku Tenggara	KMP. Tanjung Madlahar
13	Tual – Larat	Tual – Kepulauan Tanimbar	KMP. Erana
14	Saumlaki – Dobo	Kepulauan Tanimbar – Kepulauan Aru	KMP. Satya Kencana II
15	Adaut - Letwurung	Kepulauan Tanimbar – Maluku Barat Daya	KMP. Lelemuku (Docking)

Tabel III.4f Lintas Penyeberangan Perintis Dalam Kabupaten/Kota

No	Nama Lintas	Kabupaten/Kota	Nama Kapal
1	Namlea - Teluk Bara	Kab. Buru	KMP. Badaleon
2	Namlea - Kayeli	Kab. Buru	KMP. Danau Rana
3	Manipa - Buano	Kab. Seram Bagian Barat	KMP. Tanjung Sole
4	Buano - Waisala	Kab. Seram Bagian Barat	KMP. Tanjung Sole
5	Umeputih - Nalahia	Kab. Maluku Tengah	KMP. Samandar
6	Nalahia - Amahai	Kab. Maluku Tengah	KMP. Samandar
7	Waai - Kailolo	Kab. Maluku Tengah	KMP. Teluk Ambon
8	Ambalau - Namrole	Kab. Buru Selatan	KMP. Tanjung Kabat
9	Namrole - Leksula	Kab. Buru Selatan	KMP. Tanjung Kabat
10	Leksula - Tifu	Kab. Buru Selatan	KMP. Tanjung Kabat
11	Tifu - Waesasi	Kab. Buru Selatan	KMP. Tanjung Kabat
12	Waesasi - Biloro	Kab. Buru Selatan	KMP. Tanjung Kabat
13	Airnanang - Geser	Kab. Seram Bagian Barat	KMP. Lorry Amar
14	Geser - Gorom	Kab. Seram Bagian Barat	KMP. Lorry Amar
15	Gorom - Kesui	Kab. Seram Bagian Barat	KMP. Lorry Amar

16	Kesui - Teor	Kab. Seram Bagian Barat	KMP. Lorry Amar
17	Tual - Tayando	Kota Tual	KMP. Tanjung Madlahar
18	Tayando - Kur	Kota Tual	KMP. Tanjung Madlahar
19	Tanyando - Tam	Kota Tual	KMP. Tanjung Madlahar
20	Tual - Kur	Kota Tual	KMP. Lobster
21	Bandaeli - Hollat	Kota Tual	KMP. Tanjung Madlahar
22	Kur - Kaimer	Kota Tual	KMP. Tanjung Madlahar
23	Tual - Tam	Kota Tual	KMP. Erana
24	Tam - Manggur	Kota Tual	KMP. Erana
25	Dobo - Benjina	Kab. Kepulauan Aru	KMP. Lobster
26	Dobo - Lamerang	Kab. Kepulauan Aru	KMP. Satya Kencana II
27	Dobo - Serwatu	Kab. Kepulauan Aru	KMP. Lobster
28	Dobo - Marlasi	Kab. Kepulauan Aru	KMP. Satya Kencana II
29	Saumlaki - Adaut	Kab. Kepulauan Tanimbar	KMP. Lelemuku (Docking)
30	Saumlaki - Seira	Kab. Kepulauan Tanimbar	KMP. Egron
31	Seira - Wunlah	Kab. Kepulauan Tanimbar	KMP. Egron
32	Wunlah - Larat	Kab. Kepulauan Tanimbar	KMP. Egron
33	Larat - Yaru	Kab. Kepulauan Tanimbar	KMP. Egron
34	Yaru - Momar	Kab. Kepulauan Tanimbar	KMP. Egron
35	Pulau Wetar - Pulau Kisar	Kab. Maluku Barat Daya	KMP. Pulau Sabu
36	Pulau Kisar - Moa	Kab. Maluku Barat Daya	KMP. Pulau Sabu

Tabel III.4g Lintas Penyeberangan Perintis Antar Provinsi

No	Nama Lintas	Provinsi	Nama Kapal
1	Teluk Bara - Sanana	Maluku - Maluku Utara	KMP. Badaleon
2	Wahai - Fak Fak	Maluku - Papua Barat	KMP. Kalabia
3	Teluk Gurita Kisar	NTT - Maluku	KMP. Pulau Sabu
4	Tual - Kaimana	Maluku - Papua	KMP. Erana
5	Dobo - Pomako	Maluku - Papua	KMP. Satya Kencana II

Tabel III.4h Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2020 - 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pelabuhan Penyeberangan Yang Terbangun	89,19	89,19	91,89	1,96	1,96	178
Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	2,94	1,43	- 12,68	0,93	0,45	6,18

Dalam Tahun 2022 untuk peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan juga dilaksanakan kegiatan FGD pelayanan angkutan penyeberangan. Untuk kegiatan Pemeriksaan SPM Angkutan Penyeberangan terealisasi 17 Kapal yang dilakukan lokasi :

Tabel III.4i Pemeriksaan SPM Angkutan Penyeberangan

NO	LINTASAN	NAMA KAPAL	LOKASI
1.	Galala - Namlea	KMP. TEMI KMP. WAYANGAN KMP. GARDA MARITIM 5	PP. Namlea (Kabupaten Buru)
2.	Hunimua - Waipirit	KMP. INELIKA KMP. SARDINELA KMP. ROKATENDA KMP. TERUBUK KMP. TANJUNG KUAKO	PP. Waipirit (Kabupaten Seram Bagian Barat)
3.	Tual – Elat	KMP. TANJUNG MADLAHAR	PP. Tual (Kota Tual)
4.	Tual - Dobo	KMP. LOBSTER	
5.	Ambon – Air Nanang – Teor - Tual	KMP. LORRY AMAR	
6.	Tual - Larat	KMP. ERANA	
7.	Ambon – Banda Banda - Tual	KMP. BAHTERA NUSANTARA 02	PP. Banda (Kabupaten Maluku Tengah)
8.	Galala - Ambalau	KMP. TANJUNG KABAT	PP. Namrole (Kabupaten Buru Selatan)
9.	Umeputih - Wailey	KMP. LAYUR	PP. Waipirit (Kabupaten Seram Bagian Barat)
10.	Saumlaki - Dobo	KMP. SATYA KENCANA II	PP. Saumlaki (Kabupaten Kepulauan Tanimbar)
11.	Ambon – Waisala Namlea – Manipa	KMP. TANJUNG SOLE	PP. Namlea (Kabupaten Buru)

Dalam menunjang sasaran 3 maka terdapat kegiatan pelayanan administrasi bagi penyedia jasa transportasi angkutan penyeberangan. Pada tahun 2022 kelancaran pelayanan administrasi bagi penyedia jasa transportasi angkutan penyeberangan di lakukan secara 100% dimana dikeluarkan perijinan/persetujuan

pengoperasian bagi penyedia jasa transportasi sebagai berikut. Perijinan yang dikeluarkan adalah Persetujuan Pengoperasian 3 kapal penyeberangan untuk 4 lintasan Tahun 2022 yaitu:

Tabel III.4j Perijinan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan

No	Nama Kapal	Nama Lintasan
1	KMP. Inelika	Hunimua - Waipirit
2	KMP. Tanjung Sole	Waisala - Ambon
3	KMP. Lorri Amar	Ambon - Air Nanang
		Teor - Tual

Tabel III.4k Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 s/d 2022 dengan Tahun Akhir Periode Renstra

	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang terbangun	89,19	89,19	91,89	56%
2	Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	2,94	1,43	- 12,68	2,86%

Faktor Keberhasilan dalam mewujudkan sasaran ini :

1. Pembangunan infrastruktur merupakan isu strategis baik dari pemerintah pusat maupundaerah;
2. Penentuan lintasan penyeberangan ditentukan oleh Pemerintah Pusat yang merupakan produk usulan melalui mekanisme "*bottom up*" yaitu usulan dari pemerintah kabupaten kota dan dibahas secara bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan UPT Pusat yang berada didaerah sebagai pelaksana sehingga usulan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga benar-benar menjawab kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi.

Faktor mengakibatkan kegagalan dalam mewujudkan sasaran ini adalah :

1. Minimnya kapasitas SDM Dinas Perhubungan dalam melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan, sehingga seringkali dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perhubungan;

Upaya-upaya yang perlu dilakukan :

1. Kebijakan dari penganggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak hanya dititik beratkan pada infrastruktur jalan dan jembatan akan tetapi juga infrastruktur pelabuhan penyeberangan;
2. Meningkatkan koordinasi lingkup perhubungan di pusat dan daerah sehingga kegiatan perencanaan, pembangunan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik;
3. Peningkatan SDM di bidang teknis perencanaan infrastruktur perhubungan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk mendapat informasi sejauh mana penggunaan sumber daya manusia dalam mendukung tercapainya indikator kinerja. Dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Sasaran III (tiga), dilaksanakan oleh 107 orang dalam 3 kegiatan yaitu Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Kereta Api Provinsi sebanyak 3 Orang, Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi sebanyak 94 orang, serta Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Provinsi sebanyak 10 orang.

Sasaran 4 : Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut

Tabel III.5a Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1) Persentase Pelabuhan yang Terbangun	52,57	97,14%	185%
2) Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	17,8	4,55%	25%

Untuk mencapai sistem transportasi yang terpadu dan terkoneksi didahului dengan pola perencanaan yang terstruktur dan handal untuk dijadikan acuan dalam upaya mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien. Pola perencanaan yang dimaksudkan dituangkan dalam dokumen perencanaan wilayah, dokumen perencanaan teknis dan kegiatan koordinasi lainnya yang akan mendukung rencana dan proses pembangunan maupun pelayanan transportasi. Melalui APBD Tahun 2022 diprogramkan 5 dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari 1 dokumen perencanaan Pelabuhan Lokal pulau Nila, 4 dokumen laporan studi kelayakan di 4 lokasi yaitu Masohi, Banda, Sawai dan Kota Ambon.

Tabel III.5b Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2020 - 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentas Pelabuhan Yang Terbangun	94,29	95,71	97,14	1,78	182	185
Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	0	4,55	4,55	0	25,56	25

Tabel III.5c Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 s/d 2022 dengan Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
Persentase Pelabuhan yang Terbangun	94,29%	95,71%	97,14%	54,55%
Persentase Pulau Berpenghuni yang terlayani angkutan perintis	0	4,55%	4,55%	18,6%

Faktor keberhasilan dalam mewujudkan sasaran ini :

Pembangunan infrastuktur merupakan isu strategis baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam mewujudkan sasaran ini :

1. Fungsi koordinasi yang belum maksimal secara menyeluruh untuk melihat kebutuhan pencapaian pembangunan infrastruktur;
2. Anggaran dari Daerah rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur sehingga untuk mewujudkannya sangat mengandalkan dana dari pusat.
3. Minimnya kapasitas SDM Dinas Perhubungan dalam melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan, sehingga seringkali dokumen perencanaan yang dibuat tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan penilaian oleh stafteknis.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan :

1. Kebijakan dari penganggaran daerah untuk pembangunan infrstruktur transportasi yang tidak hanya dititik beratkan pada infrastruktur jalan dan jembatan akan tetapi juga infrastruktur pelabuhan laut;
2. Meningkatkan koordinasi lingkup perhubungan di pusat dan daerah sehingga kegiatan perencanaan, pembangunan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik;
3. Peningkatan SDM di bidang teknis perencanaan infrastrukturperhubungan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk mendapat informasi sejauh mana penggunaan sumber daya manusia dalam mendukung tercapainya indikator kinerja. Dalam mendukung pelaksanaan

program/kegiatan pada Sasaran IV (empat), dilaksanakan oleh 6 orang dalam 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

Tabel III.7 Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode RPJMD 2021 - 2022

Capaian Kinerja Sampai Akhir Periode RPJMD 2021 - 2022

Indikator Kinerja		Target s/d 2021 (RPJMD)	Realisasi s/d 2021	Indikator Kinerja		Target 2022 (RPJMD)	Realisasi 2022
1)	Tingkat Keselamatan Transportasi	100%	100%	1)	Tingkat Keselamatan Transportasi	100%	100%
2)	Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi jalan	9%	16,01%	2)	Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi jalan	9%	- 34,11%
3)	Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	45,4	89,19%	3)	Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	51,22	91,89%
4)	Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	3,13	1,43%	4)	Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	3,03	-12,68%
5)	Persentase Pelabuhan yang Terbangun	52,57	95,71%	5)	Persentase Pelabuhan yang Terbangun	52,57	97,14%
6)	Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	17,8	4,55%	6)	Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	18,2	4,55%

Untuk menunjang sasaran maka dibutuhkan dukungan yang baik dari dalam internal Dinas Perhubungan Provinsi Maluku bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan program kegiatan Dinas Perhubungan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan yang menunjang kinerja aparatur selama 1 tahun dan merupakan program kegiatan rutin setiap tahun, sudah terealisasi pada program/kegiatan APBD 2022 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terdiri Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan, terealisasi 100 %, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yang terealisasi 88%, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan dan

teralisasi 100%, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan dan teralisasi 100%, dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan dan teralisasi 100% dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan dan teralisasi 100%.

2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM ASN Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Kecukupan sarana, prasarana serta jaringan transportasi akan meningkatkan pelayanan di sektor perhubungan namun tidak akan pernah tercapai tanpa didukung oleh ketersediaan SDM yang handal sebagai motor penggerak. Salah satu indikator ketersediaan SDM aparatur adalah tingkat pendidikannya. Pada tahun 2022 pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berjumlah 62 orang dengan tingkat pendidikan S3 1 orang, S2 3 orang, S1 33 Orang, Diploma IV 6 Orang, Diploma III 3 Orang, Diploma II 2 Orang, dan SMA 14 Orang.

3. Dukungan terhadap peningkatan capaian kinerja serta meningkatkan peran dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran serta mewujudkan fungsi dan peran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terhadap masyarakat dan mitra kerja maka untuk Tahun 2022 dengan dana APBD kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan dan Rakernis Dinas Perhubungan merupakan kegiatan Tahunan yang didalamnya dibahas Rancangan usulan program kegiatan pembangunan dan pelayanan transportasi untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Provinsi Maluku (APBN dan APBD) teralisasi 94%, kegiatan monitoring evaluasi hari-hari besar keagamaan teralisasi 82%.

III.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja pada APBD untuk penyelenggaraan urusan wajib perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Rp19.092.032.854,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 desember 2022 sebesar Rp17.036.965.667,- atau mencapai 89,24% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.055.067.187,- .

Tabel III.8 Realisasi Anggaran

Program	Kegiatan	Anggaran		Realiasi (Rp)
		Murni (Rp)	Pergeseran (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.977.007.001	1.977.007.001	1.848.775.224
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.229.594.369	6.428.800.594	6.139.304.067
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	347.050.500	347.050.500	284.251.816
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193.653.004	193.653.004	193.395.875
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.595.271.175	1.595.271.175	1.201.379.641
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.330.000	104.330.000	104.318.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.402.301.512	2.472.501.512	2.170.807.138
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	651.340.000	651.340.000	531.270.281
Program Penyelenggaraan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota	891.276.069	891.276.069	727.071.696

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	53.959.000	152.959.000	148.328.150
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	206.253.600	333.726.833	265.269.860
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	333.860.506	1.067.198.331	996.482.316
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.604.123.163	2.039.638.835	1.884.315.003
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	197.244.500	837.280.000	541.995.800

IV.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan sasaran capaian targetnya belum sepenuhnya tercapai pada tahun 2022. Akan tetapi dalam perencanaan jangka menengah diharapkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerja di masa- masa mendatang.

Pencapaian kinerja tahun 2022 juga diharapkan dapat menjawab target sasaran yang akan ditetapkan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024. Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan menetapkan 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 hasil capaian kinerja kegiatan yang ditetapkan secara umum tidak sepenuhnya dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh karena adanya berbagai kendala yang dihadapi.

IV.2 Saran

Problematisa pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu memperkuat peran kelembagaan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah melalui sektor perhubungan Provinsi Maluku
2. Mengutamakan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran “bottom up” dari pada pola “top down.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pembangunan transportasi.

4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

RENCANA STRATEGIS (2019 - 2024)

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau dengan peningkatan sarana, prasarana wilayah, penyelenggaraan transportasi yang terkoneksi antar gugus pulau serta didukung SDM yang berkompeten di bidang transportasi.	Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara dan Antar Moda	- Tingkat Keselamatan Transportasi	Review Studi Rencana Induk Bandar Udara Baru Pulau Babar (Tepa) Sosialisasi Pembinaan Keselamatan Transportasi Sejak Usia Dini	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
	Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat (LLAJ)	Penurunan Angka Kecelakaan - Transportasi Jalan	Penyusunan Alokasi Subsidi Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Angkutan Lebaran dan Angkutan Natal Tahun Baru Penertiban dan pendataan kelengkapan administrasi bagi penyedia jasa angkutan AKDP	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	Peningkatan Pelayanan Transportasi Penyeberangan	- Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	Penyediaan prasarana transportasi yang baru sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dengan menggabungkan melalui pemerintah daerah maupun mengusulkan ke pemerintah pusat	- Program Pengelolaan Pelayanan	

1	2	3	4	5	6
		- Pertumbuhan trayek Angkutan Penyeberangan	Pemeriksaan prasarana penyeberangan Melaksanakan diskusi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perencanaan dan evaluasi pelayanan angkutan penyeberangan	- Program Pengelolaan Pelayaran	
	Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	- Persentase Pelabuhan yang Terbangun - Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	Melaksanakan diskusi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perencanaan dan evaluasi pelayanan angkutan perintis Melaksanakan kegiatan monitoring langsung ke lokasi untuk pemantauan dan evaluasi pelabuhan laut terbangun Melaksanakan diskusi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perencanaan dan evaluasi pelayanan angkutan laut perintis Melaksanakan kegiatan monitoring langsung ke lokasi untuk pemantauan dan evaluasi pelayanan angkutan laut	- Program Pengelolaan Pelayaran	

Catatan : Penyesuaian dengan perubahan indikator kinerja sasaran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

Penyesuaian dengan APBDP Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara dan Antar Moda	- Tingkat Keselamatan Transportasi
2.	Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat (LLAJ)	- Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan
3.	Peningkatan Pelayanan Transportasi Penyeberangan	- Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun
		- Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan
4	Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	- Persentase Pelabuhan Terbangun
		- Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7,315,112,892	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 891,276,069	APBD
3. Program Pengelolaan Pelayanan	Rp 2,684,862,468	APBD
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 536,530,000	APBD

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN ANGGARAN 2022
(Penyesuaian terhadap DPPA)**

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

Sasaran					Program	Kegiatan				Ket.
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara dan Antar Moda	- Tingkat Keselamatan Transportasi	%	100	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan : - Dana Keluaran : - Terselenggaranya Review Studi Bandara Hasil : - Tersedianya dokumen Review Studi Bandara Pulau Babar Tapa Manfaat : - Menunjang kebutuhan transportasi untuk masyarakat. Dampak : - Meningkatkan kualitas transportasi yang ada di Maluku	Rp 1 % % %	1,400,419,000 Dokumen 100 100	
					2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Tersedianya laporan sosialisasi keselamatan transportasi sejak usia dini Hasil : - Terselenggaranya sosialisasi keselamatan transportasi Manfaat : - Meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan transportasi Dampak : - Meningkatkan keselamatan transportasi	Rp Dokumen Sekolah % %	24,723,000 1 2 100 100	
2	Peningkatan Pelayanan Transportasi darat (LLAJ)	- Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi jalan	%	9	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Masukan : - Dana Keluaran : - Tersedianya Laporan Jumlah Bus yang tersubsidi	Rp Unit	837,280,000 6	

							- Tersedianya Laporan Subsidi Bahan bakar minyak untuk AKDP	Laporan	1		
							Hasil : - Terlaksananya Subsidi untuk 6 unit Bus - Terlaksananya Subsidi BBM untuk AKDP	% &	100 100		
							Manfaat : - Meningkatkan keselamatan kendaraan (bus) - Meningkatkan kualitas kendaraan AKDP	% %	100 100		
							Dampak : - Mendukung peningkatan keselamatan kendaraan (bus) - Mendukung peningkatan kualitas kendaraan AKDP	% %	100 100		
				2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi hari-hari besar keagamaan yang tersedia Hasil : - Tersedianya Laporan Monitoring dan evaluasi hari-hari besar keagamaan yang tersedia Manfaat : - Meningkatkan pengawasan hari-hari besar keagamaan yang tersedia Dampak : - Mendukung peningkatan keselamatan transportasi	Rp Dokumen	558,544,469 3	
						3	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah laporan penegakan disiplin dan pengawasan yang terlaksana serta jumlah bus yang tersubsidi dan pengawasan yang terlaksana Hasil : - Terlaksananya penegakan disiplin dan pengawasan AKDP Manfaat : - Menghindari terjadinya penyimpangan trayek dan terkontronya angkutan yang beroperasi Dampak : - Dapat bertransportasi sesuai aturan yang berlaku	Rp Dokumen	332,731,600 1	
								% %	100 100		
								% %	100 100		

3	Peningkatan Pelayanan Transportasi Penyeberangan	- Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	%	51,52	1 Program Pengelolaan Pelayaran	1 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Dansu yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah dokumen perencanaan dermaga penyeberangan tersusun Hasil: - Terlaksananya studi DED, Studi Review DED Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manfaat: - Menjadi bahan evaluasi perbaikan pelayanan pelabuhan penyeberangan Dampak: - Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan penyeberangan bagi masyarakat Maluku	Rp Dokumen Laporan % %	2,039,638,835 4 4 100 100	
		- Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	%	182	1 Program Pengelolaan Pelayaran	2 Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah dokumen pemenuhan standar pelayanan minimum kapal angkutan penyeberangan dan pengawasan terhadap kapal-kapal milik Pemda Provinsi Maluku Hasil: - Jumlah laporan hasil pemeriksaan SPM kapal penyeberangan Manfaat: - Menjadi bahan evaluasi pelayanan sarana transportasi penyeberangan Dampak: - Menunjang peningkatan kualitas pelayanan angkutan penyeberangan bagi masyarakat	Rp Dokumen Laporan % %	333,726,833 2 17 100 100	
						3 Penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen usulan jaringan penyeberangan perintis Maluku tahun 2023 yang terbentuk - Studi DED Bus Air Ro-Ro Hasil: - Jumlah Laporan Studi DED Bus Air Ro-Ro Manfaat: - Meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan perintis yang optimal Dampak: - Mendorong pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Rp Dokumen Dokumen Dokumen % %	152,959,000 1 1 1 100 100	
4	Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	- Persentase Pelabuhan Yang Terbangun	%	52,57	1 Program Pengelolaan Pelayaran	1 Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Masukan:			

		Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	%	17,8				- Dana	Rp	1,067,198,331	
								Keluaran :			
								- Jumlah dokumen studi Pra FS Pelabuhan Laut di Wilayah Teon, Nila, Serua	Dokumen	1	
								- Study Kelayakan Pengoperasian Wig Craft	Dokumen	1	
								Hasil :			
								- Jumlah Laporan studi Pra FS Pelabuhan Laut di Wilayah Teon, Nila, Serua	Laporan	1	
								- Jumlah Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Wig Craft	Laporan	1	
								Manfaat :			
								- Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan laut yang optimal	%	100	
								Dampak :			
								- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan laut bagi masyarakat Maluku	%	100	

LAMPIRAN IV

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2022**

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

No	Sasaran					Prosentase Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara dan Antar Moda	- Tingkat Keselamatan Transportasi	%	100	100	100	APBD
2	Peningkatan Pelayanan Transportasi darat (LLAJ)	- Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan	%	9	-34.11	-379	APBD
3	Peningkatan Pelayanan Transportasi Penyeberangan	- Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	%	51.52	91.89	178	APBD
		- Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	%	3.03	-12.68	-418	APBD
4	Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut	- Persentase Pelabuhan yang Terbangun	%	52.57	97.14	185	APBD
		- Persentase Pulau Berpenghuni yang Terlayani Angkutan Laut Perintis	%	18.2	4.55	25.0	APBD

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2022**

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

1	Program	Kegiatan						Ket.
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan :					
			- Dana	Rp	1,692,980,010	1,595,713,570	94.25	
			Keluaran :					
			- Jumlah Dokumen Forum SKPD, Rakernis Perhubungan dan Musrenbang, Review Studi Rencana Induk Bandara Pulau Babar (Teja)	Dokumen	3	3	100	
			Hasil :					
			- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahunan	%	100	100	100.00	
		2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Manfaat :					
			- Keselarasan dokumen perencanaan tahunan	%	100	100	100.00	
			Dampak :					
			- Menunjang kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	%	100	100	100.00	
			Masukan :					
			- Dana	Rp	60,208,656	60,091,590	99.81	
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran :					
			- Jumlah Dokumen RKA dan DPA dan Perubahannya	Dokumen	4	4	100	
			Hasil :					
			- Tersusunnya RKA dan DPA dan Peregereseran	%	100	100	100.00	
			Manfaat :					
			- Tersedianya Dokumen DPA dan RKA dan Peregereserannya	%	100	100	100.00	
			Dampak :					
			- Menunjang kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	%	100	100	100.00	
			Masukan :					
			- Dana	Rp	124,702,000	102,400,190	82.12	
			Keluaran :					
			- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Perhubungan	Dokumen	1	1	100	
			Hasil :					
			- Terpantaunya kegiatan pembangunan dan rencana pembangunan prasarana perhubungan	%	100	100	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manfaat : - Tersedianya data dan informasi hasil pembangunan dan perencanaan pada APBD Dampak : - Optimalnya fungsi koordinasi dinas dalam pelaksanaan program pengawasan prasarana perhubungan Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi pelayanan angkutan udara dan dokumen evaluasi kinerja Hasil : - Laporan hasil Monitoring evaluasi pelayanan angkutan udara dan dokumen evaluasi kinerja Manfaat : - Mengetahui pelayanan angkutan udara dan evaluasi kinerja. Dampak : - Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	%	100	100	100.00	
		5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Hasil : - Terseleenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Manfaat : - Menjamin kenyamanan aparatur dan melaksanakan tugas administrasi perkantoran. Dampak : - Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	Rp	6,384,640,894	6,095,177,242	95.47	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan Keuangan Hasil : - Laporan Hasil Realisasi Keuangan Manfaat : - Kelancaran Operasional perkantoran. Dampak : - Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	Rp	44,159,700	44,126,825	99.93	
				Dokumen	5	5	100.00	
				Laporan	5	5	100.00	
				%	100	100	100.00	
				%	100	100	100.00	
				Paket	1	1	100.00	
				%	100	100	100.00	
				%	100	100	100.00	
				%	100	100	100.00	
				Paket	1	1	100.00	
				Paket	1	1	100.00	
				%	100	100	100.00	
				%	100	100	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Terlaksananya pengamanan barang milik daerah Hasil : - Laporan hasil pengamanan barang milik daerah Manfaat : - Kelancaran rutinitas pekerjaan kantor dan operasional lapangan Dampak : - Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	Rp Paket Laporan % %	205,115,300 1 1 100 100	160,771,574 1 100 100	78.38 100.00 100.000 100.000 100.000	
		8 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah Hasil : - Laporan hasil pembinaan dan pengawasan barang milik daerah Manfaat : - Kelancaran rutinitas pekerjaan kantor dan operasional lapangan Dampak : - Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	Rp Paket % % %	141,935,200 1 100 100 100	123,480,242 1 100 100 100	87.00 100.00 100.00 100.00 100.00	
		9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan pakaian olahraga Hasil : - Terpenuhinya kebutuhan akan pakaian seragam dinas bagi aparatur Dinas Perhubungan Promal Manfaat : - Penerapan disiplin berpakaian yang benar sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku Dampak : - Menunjang kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	Rp Paket Paket % %	193,653,004 1 1 100 100	193,365,875 1 100 100	99.87 100.00 100.00 100.00 100.00	
		10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan : - Dana Keluaran :	Rp	32,965,000	32,947,295	99.95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	%	100	100	100.00	
			Hasil :					
			- Tingkat kecukupan penerangan kantor dalam kurun waktu 1 tahun.	%	100	100	100.00	
			Manfaat :					
			- Kenyamanan dan Kelancaran Operasional Perkantoran	%	100	100	100.00	
			Dampak :					
			- Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	%	100	100	100.00	
		11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Masukan :					
			- Dana	Rp	140,960,175	140,921,075	99.97	
			Keluaran :					
			- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	%	100	100	100.00	
			Hasil :					
			- Kelancaran pelaksanaan tugas tugas perkantoran	Tahun	1	1	92.00	
			Manfaat :					
			- Melengkapi perlengkapan kantor	%	100	100	100.00	
			Dampak :					
			- Perlengkapan kantor terpenuhi	%	100	100	100.00	
		12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan :					
			- Dana	Rp	138,919,000	138,703,145	99.84	
			Keluaran :					
			- Tersedianya Alat Tulis Kantor	%	100	100	100.00	
			Hasil :					
			- Terjaminnya kebutuhan makan dan minum peserta rapat atau kegiatan tak terduga	%	100	100	100.00	
			Manfaat :					
			- Menunjang kelancaran kegiatan rapat atau kegiatan tak terduga	%	100	100	100.00	
			Dampak :					
			- Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	%	100	100	100.00	
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Daerah Provinsi	Masukan :					
			- Dana	Rp	55,750,000	55,749,719	100.00	
			Keluaran :					
			- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	%	100	100	100.00	
			Hasil :					
			- Tercukupinya Kebutuhan Barang Cetak dan penggandaan dalam kurun waktu 1 tahun.	%	100	100	100.00	
			Manfaat :					
			- Kelancaran rutinitas pekerjaan kantor dan operasional lapangan	%	100	100	100.00	
			Dampak :					
			- Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	%	100	100	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Konsultasi dan koordinasi rapat daerah dan luar daerah dan luar negeri Hasil : - Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pelayanan di bidang perhubungan Marfaat : - Kelancaran operasional aparatur Dishub Promal. Dampak : - Kelancaran koordinasi dan konsultasi skpd	Rp Paket % % % %	1,226,677,000 4 100 100 100 100	833,058,407 4 100 100 100 100	67.91 100 100.00 100.00 100.00	
		15 Pengadaan Mebel	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah meubeler yang diadakan Hasil : - Membangun kepercayaan mitra kerja Marfaat : - tercipta kenyamanan dan keteraturan menunjang Dampak : - Kelancaran kinerja pelayanan aparatur Dishub Promal	Rp Paket % % %	104,330,000 1 100 100 100 100	104,318,800 1 100 100 100 100	99.99 100.00 100.00 100.00 100.00	
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : - Dana Keluaran : - Terpenuhiya pelayanan jasa surat menyurat Hasil : - Persentase Kelancaran Aministrasi Perkantoran Marfaat : - Kelancaran admisnistrasi perkantoran Dampak : - Menunjang kinerja pelayanan satpam Dishub Promal	Rp % % % %	28,230,000 100 100 100 100 100	22,414,000 100 100 100 100 100	79.40 100.00 100.00 100.00 100.00	
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : - Dana Keluaran : - Terpenuhiya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Hasil : - Tingkat kecukupan pelayanan komunikasi, informasi, air dan listrik. Marfaat : - Persentase kelancaran kegiatan administrasi perkantoran dan informasi yang cepat Dampak :	Rp % % %	430,653,000 100 100 100 100	308,938,171 100 100 100 100	71.74 100.00 100.00 100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Menunjang kinerja pelayanan aparaturn Dishub Promal Masukan : - Dana Keluaran : - Tersedianya jasa perbaikan/perawatan peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : - Kelancaran rutinitas pekerjaan kantor Manfaat : - Menjamin kenyamanan aparaturn dan melaksanakan tugas administrasi perkantoran. Dampak : - Menunjang kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	% Rp % % % %	100 52,655,000 100 100 100 100	100 52,441,637 100 100 100 100	100.00 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00	
		19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : - Dana Keluaran : - Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran Hasil : - Kelancaran pelayanan umum serta pekerjaan kantor Manfaat : - Prosentase kelancaran kegiatan pelayanan dan administrasi perkantoran. Dampak : - Mendukung pelayanan dan administrasi perkantoran	Rp % % % %	1,960,963,512 100 100 100 100	1,787,015,330 100 100 100 100	91.13 100.00 100.00 100.00 100.00	
		20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : - Dana Keluaran : - Tersedianya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan - Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Hasil : - Jumlah kendaraan dapat digunakan untuk kegiatan Manfaat : - Kelancaran operasional aparaturn Dishub Promal. Dampak : - Kelancaran kinerja aparaturn Dishub Promal.	Rp Paket Unit % %	584,580,000 1 100 100 100	465,084,581 1 100 100 100	79.56 100.00 100.00 100.00 100.00	
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terawat Hasil : - Tersedianya gedung kantor yang nyaman	Rp Paket %	66,760,000 1 100	66,185,700 1 100	99.14 100.00 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Manfaat : - Menunjang kenyamanan aparaturnya dalam melaksanakan tugas Dampak : - Kelancaran kinerja pelayanan aparaturnya Dishub Promal	%	100	100	100	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Pengedalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi 2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan penegakan disiplin dan pengawasan yang terlaksana serta jumlah bus yang tersubsidi Hasil : - Terlaksananya pengawasan rutin AKDP dan pengawasan bus yang tersubsidi Manfaat : - Menghindari terjadinya penyimpangan trayek dan terkontrolnya angkutan yang beroperasi. Dampak : - Tertibnya pelayanan jasa angkutan AKDP Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Hari - hari Besar Keagamaan yang tersedia Hasil : - Laporan Pelayanan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, angkutan Laut, dan angkutan udara yang tiba dan berangkat di P. Ambon terpantau dan terkendali Manfaat : - Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat Maluku dalam perayaan hari - hari besar keagamaan Dampak : - Kelancaran perayaan hari - hari besar keagamaan bagi	Rp Unit Lokasi % % Rp Paket Laporan % %	332,731,600 6 5 100 100 558,544,469 2 2 100 100	268,669,500 6 5 100 100 458,402,196 2 2 100 100	80.75 100.00 100 100 82.07 100.00 100 100	
3	Program Pengebalaan Pelayanan	1. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah laporan DED Bus Air-RoRo Hasil : - Laporan DED Bus Air Ro-Ro Manfaat : - Menjadi bahan evaluasi pelayanan sarana transportasi penyeberangan Dampak : - Menunjang peningkatan kualitas pelayanan angkutan penyeberangan bagi masyarakat	Rp Dokumen % % %	152,959,000 1 100 100 100	148,328,150 1 100 100 100	96.97 100 100 100 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah dokumen pemenuhan standar pelayanan Hasil : - Jumlah laporan hasil pemeriksaan SPM kapal penyeberangan Manfaat : - Menjadi bahan evaluasi pelayanan sarana transportasi penyeberangan Dampak : - Menunjang peningkatan kualitas pelayanan angkutan penyeberangan bagi masyarakat.	Rp Kapal Laporan % %	333,726,833 17 17 100 100	265,269,860 17 100 100	79.49 100.00 100 100	
		3 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah dokumen studi Pra FS Pelabuhan Laut di wilayah Teon, Nila, Serua (TNS) Hasil : - Laporan studi Pra FS Pelabuhan Laut di TNS Manfaat : - Kelancaran transportasi laut Dampak : - Mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan laut bagi masyarakat	Rp Dokumen Laporan % %	1,067,198,331 1 1 100 100	996,482,316 1 100.00 100.00	93.37 100 100.00 100.00	
		4 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang melayani Trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah dokumen perencanaan dermaga penyeberangan tersusun Hasil : - Laporan dokumen perencanaan dermaga Manfaat : - Menjadi bahan evaluasi pengoperasian pelabuhan pengumpan regional Dampak : - Mendorong pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	Rp Dokumen Laporan % %	2,039,638,835 7 7 100 100	1,884,315,003 7 100 100	92.38 100.00 100.00 100.00	
		4 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang melayani Trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Masukan : - Dana Keluaran : - Jumlah dokumen perencanaan dermaga penyeberangan tersusun	Rp Dokumen	2,039,638,835 7	1,884,315,003 7	92.38 100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Hasil : - Laporan dokumen perencanaan dermaga penyeberangan tersusun Manfaat : - Menjadi bahan evaluasi pengoperasian pelabuhan pengumpan regional Dampak : - Mendorong pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	Laporan % %	7 100 100	7 100 100	100.00 100.00 100.00	

Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi				Sisa Anggaran	Bobot Kegiatan	% Real Fisik Kumulatif
			Keuangan		Fisik				
			(Rp.)	(%)	(%)	Kumulatif (%)			
1	2	3	4	5	6	6	7		8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,977,007,001					128,114,711		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,692,980,010	1,595,713,570	94.25	100	94.00	97,266,440	0.089	8.87
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60,208,656	60,091,590	99.81	100	100.00	117,066	0.003	0.32
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124,702,000	102,400,190	82.12	100	82.00	22,301,810	0.007	0.65
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,116,335	90,569,874	91.38	100	100.00	8,546,461	0.005	0.52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,428,800,594					289,496,527		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,384,640,894	6,095,177,242	95.47	100	95.00	289,463,652	0.334	33.43
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44,159,700	44,126,825	99.93	100	100.00	32,875	0.002	0.23
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	347,050,500					62,798,684		
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	205,115,300	160,771,574	78.38	100	78.00	44,343,726	0.011	1.07
	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	141,935,200	123,480,242	87.00	100	87.00	18,454,958	0.007	0.74
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193,653,004					257,129		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	193,653,004	193,395,875	99.87	100	100.00	257,129	0.010	1.01
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,595,271,175					393,891,534		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,965,000	32,947,295	99.95	100	100.00	17,705	0.002	0.17
	- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	140,960,175	140,921,075	99.97	100	100.00	39,100	0.007	0.74
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138,919,000	138,703,145	99.84	100	100.00	215,855	0.007	0.73
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55,750,000	55,749,719	100.00	100	100.00	281	0.003	0.29
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,226,677,000	833,058,407	68	100	68.00	393,618,593	0.064	6.43
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104,330,000					11,200		
	- Pengadaan Mebel	104,330,000	104,318,800	100	100	100.00	11,200	0.005	0.55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,472,501,512					301,694,374		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,230,000	22,414,000	79.40	100	79.00	5,816,000	0.001	0.15
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430,653,000	308,936,171	71.74	100	72.00	121,716,829	0.023	2.26
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,655,000	52,441,637	99.59	100	100.00	213,363	0.003	0.28
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,960,963,512	1,787,015,330	91.13	100	100.00	173,948,182	0.103	10.27
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	702,324,000					120,069,719		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584,580,000	465,084,581	79.56	100	80.00	119,495,419	0.031	3.06
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66,760,000	66,185,700	99.14	100	100.00	574,300	0.003	0.35

1	2	3	4	5	6	6	7	8
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN							
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	558,544,469					100,142,273	
-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	558,544,469	458,402,196	82.07	100	100.00	100,142,273	0.029
-	Pengendalian Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota dalam Satu daerah Provinsi	332,731,600	268,669,500	80.75	100	81.00	64,062,100	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	99,999,712					4,630,850	
-	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	152,959,000	148,328,150	96.97	100	100.00	4,630,850	0.008
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	333,726,833					68,456,973	
-	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	333,726,833	265,269,860	79.49	100	79.00	68,456,973	0.017
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1,067,198,331					70,716,015	
-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1,067,198,331	996,482,316	93.37	100	-	70,716,015	0.056
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	324,552,362					155,323,832	
-	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,039,638,835	1,884,315,003	92.38	100	100.00	155,323,832	0.107
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	550,000,000					295,284,200	
-	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	837,280,000	541,995,800	64.73	100	65.00	295,284,200	0.044
	TOTAL	19,092,032,854	17,036,965,667	89.2		2460.00	2,055,067,187	0.98

**PROGRAM / KEGIATAN DAN PENGGUNAAN SDM DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS**

Sasaran	Program / Kegiatan	Alokasi SDM (PNS / HONORER)	KETERANGAN
1	2	3	4
1. Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, laporan keuangan dan administrasi kepegawaian perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	109 Orang 53 Orang 33 Orang 57 Orang 62 Orang 43 Orang 49 Orang 16 Orang 3 3 3 3 167 -	PPTK & Pejabat Eselon II, III dan IV, Staf Subag Perencanaan dan Perwakilan dari masing - masing bidang PPTK & Pejabat Eselon II, III dan IV, Staf Subag Perencanaan dan Perwakilan dari masing - masing bidang PPTK & Pejabat Eselon II, III dan IV, Staf Subag Perencanaan dan Perwakilan dari masing - masing bidang PPTK & Pejabat Eselon II, III dan IV, Staf Subag Perencanaan dan Perwakilan dari masing - masing bidang PPTK dan Pegawai Dishub Promal PPTK & Pejabat Eselon II, dan IV, Staf Subag Keuangan dan Perwakilan dari masing - masing bidang PPTK & Pejabat Eselon II, dan IV, Staf dan Perwakilan dari masing - masing bidang PPTK dan Staf Dishub Promal PPTK dan Para Pejabat Dishub Promal PPTK PPTK PPTK PPTK PPTK, Pejabat Eselon II dan III dan Staf Dishub Promal PPTK dan Pejabat Pengadaan

1	2	3	4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- - - - - -	PPTK PPTK PPTK PPTK PPTK PPTK dan Pejabat Pengadaan
2.	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Penegakan disiplin LLAJ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Pengendalian Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota dalam Satu daerah Provinsi	1227 Orang 224 Orang	PPTK, Pejabat Eselon II, III, dan IV dan Staf Dishub Promal PPTK, Golongan II, III, dan IV dan Staf Dishub Promal
3.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan sarana prasarana fasilitas angkutan laut dan angkutan penyeberangan PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Orang 94 Orang 6 Orang 10 Orang	PPTK dan Staf Bidang Penyeberangan PPTK dan Staf Bidang Laut PPTK & Pejabat Eselon II, III dan IV, Staf Dishub Provml PPTK & Pejabat Eselon II, III dan IV, Staf Dishub Provml
5.	Jumlah Dokumen Alokasi Subsidi dan Pengawasannya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	300 Orang	Staf Bidang LLAJ

Daftar Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

No.	No Rekening	Jenis Penerimaan	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan		Ket
			APBD Murni	APBD Perubahan	(Rp.)	%	
			(Rp.)	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41020205	Retribusi Sewa Ruang Kantor	47,385,000	47,385,000	12,000,000	25.32%	PTSP
2	41020301	Retribusi Izin Trayek AKDP	160,000,000	160,000,000	197,000,000	123.13%	
3	41020301	Retribusi Izin Pengoperasian Kapal Penyeberangan Antar Kota / Kabupaten Dalam Provinsi	56,350,000	56,350,000	33,500,000	59.45%	
4	41020301	Retribusi Izin Angkutan Laut	4,200,000	4,200,000	3,250,000	77.38%	
Jumlah			267,935,000	267,935,000	245,750,000	91.72%	